



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA

Arif. S¹, Manan Sailan², Rifdan³, Muhammad Guntur⁴

Abstract: ARIF S, 2023 "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima". Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Negeri Makasar. Di bimbing langsung oleh Manan Sailan dan Rifdan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis belum teraksesnya proyek pembangunan infrastruktur jalan. Untuk mendeskripsikan dan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian ini menggunakan enam indikator yaitu, Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Lingkungan sosial ekonomi dan politik. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisisnya terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan palibelo sudah terlaksana dengan baik dan bertujuan untuk memperbaiki kondisi jalan karena meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung transportasi barang dan Perkembangan pembangunan jalan yang sangat penting bagi masyarakat. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan palibelo kabupaten bima, Pembangunan infrastruktur sering kali membutuhkan biaya besar, Keterbatasan anggaran bisa menjadi hambatan utama yang menghambat percepatan proyek infrastruktur jalan. Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan di kecamatan palibelo kabupaten bima, Masyarakat selalu ikut serta dalam memberikan masukan pemikiran ataupun tenaga dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima..

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah sebuah proses yang melibatkan berbagai tahapan, pemangku kepentingan, dan aspek-aspek penting. Dalam lingkup yang lebih luas, implementasi kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut. Berikut adalah gambaran lebih rinci tentang implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di NTB bisa dilakukan Setelah dana tersedia, proyek-proyek infrastruktur jalan harus didesain dan direncanakan secara teknis. Ini mencakup pembuatan rencana teknis, spesifikasi, dan

dokumentasi yang diperlukan untuk memulai konstruksi harus ada Implementasi proyek infrastruktur jalan seringkali melibatkan pengadaan lahan yang diperlukan dan mendapatkan izin dari pemilik lahan serta otoritas terkait. Implementasi kebijakan juga mencakup pada upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.

Mengakomodasi kebutuhan dan keprihatinan mereka dan Pemerintah harus secara berkala mengevaluasi kinerja infrastruktur jalan yang telah dibangun dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ini bisa melibatkan perluasan jalan, perbaikan keamanan, atau peningkatan kebijakan ini juga harus melibatkan pengukuran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan infrastruktur jalan. Ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini telah mencapai tujuan dari Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di NTB adalah upaya yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang andal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong oleh beberapa faktor kunci yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi wilayah tersebut. Beberapa latar belakang implementasi kebijakan yang ada di NTB adalah provinsi yang terdiri dari berbagai pulau, dan aksesibilitas antara pulau-pulau ini dapat menjadi tantangan. Ketidaksetaraan aksesibilitas dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masyarakat karena potensi besar dalam sektor pariwisata dengan objek wisata yang menarik seperti Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Infrastruktur jalan yang baik dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi secara keseluruhan yang berada zona rawan gempa bumi dan tsunami. Infrastruktur jalan yang kokoh dan tahan gempa dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan memungkinkan respons yang lebih cepat dalam situasi darurat semoga kondisi NTB kedepan lebih aman dan kondusif karena NTB memiliki potensi untuk menjadi pintu gerbang menuju Timor Leste dan negara-negara tetangga lainnya. Kebijakan ini dapat meningkatkan konektivitas antara NTB dan negara-negara tetangga serta mendukung perdagangan regional.

Pemerintah Kabupaten Bima melakukan evaluasi dan identifikasi kebutuhan infrastruktur jalan di seluruh wilayahnya. Ini melibatkan analisis terhadap kondisi jalan yang sudah ada, mengidentifikasi titik-titik rawan, serta mendengarkan masukan dari masyarakat setempat untuk memprioritaskan proyek-proyek yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan diidentifikasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Ini termasuk alokasi dana dari anggaran pemerintah daerah, dana otonomi daerah, dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan untuk pembangunan jalan ialah membutuhkan Proses pengadaan lahan yang diperlukan untuk proyek jalan dimulai.

Hal ini mencakup perizinan yang diperlukan dan negosiasi dengan pemilik lahan untuk memastikan lahan yang diperlukan dapat diperoleh dengan lancar dan bagus pengadaan lahan, proyek jalan harus didesain secara teknis. Ini mencakup penyusunan rencana teknis, spesifikasi teknis, dan perhitungan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan konstruksi dari Proyek-proyek pembangunan jalan dimulai, termasuk pekerjaan seperti pengerasan jalan, pembangunan jembatan, pengaspalan, dan pembangunan fasilitas jalan lainnya sesuai dengan rencana teknis dan pemerintah Kabupaten Bima akan berkolaborasi dengan pemerintah NTB dan Selama tahap

konstruksi, manajemen proyek yang efektif diperlukan untuk memantau perkembangan proyek, mengendalikan biaya, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal akan dilakukan pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur jalan harus diawasi dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa jalan tersebut tetap dalam kondisi baik dan aman untuk digunakan dalam jangka panjang dan pemerintah Kabupaten Bima.

Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima harus memperhatikan prioritas-prioritas pembangunan lokal, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini adalah langkah penting dalam meningkatkan konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup penduduk Di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima di NTB.

METODE

Analisis data penelitian nantinya akan dilakukan dengan mengacu pada teknik analisis data yang diperkenalkan oleh Miles, Huberman dan Saldana, yaitu Analisis Model Interaktif (Höhna et al., 2016; Jackson et al., 2014; Postmes et al., 2005) . Namun sebelum melakukan analisis data, peneliti akan melakukan triangulasi (sumber, metode, dan teori) terhadap data yang telah diperoleh peneliti untuk menguji keabsahan data. Dalam teknik analisis ini nantinya data yang telah dikumpulkan dan diuji keabsahannya akan direduksi. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dimensi yang digunakan untuk menganalisis penanganan stunting. Setelah data direduksi, data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, gambar, dan grafik. Penyajian data dalam berbagai bentuk dilakukan peneliti untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Dalam menyusun kesimpulan, peneliti tidak merangkum hasil penelitian secara keseluruhan, namun peneliti memaknai pengelolaan kolaboratif tata kelola dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Palibelo kabupaten Bima.

HASIL PENELITIAN

Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menentukan kualitas, keberlanjutan, dan keselamatan proyek. Kebijakan mencakup standar teknis, spesifikasi material, desain jalan, dan metode konstruksi. Sasaran melibatkan pencapaian progres bulanan menuju pemenuhan target akhir. Kebijakan ini juga fokus pada keberlanjutan, termasuk perlindungan lingkungan dan keterlibatan masyarakat, memastikan proyek berjalan efisien dan memberikan dampak positif jangka panjang.

Sumber daya

Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo melibatkan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi yang strategis. Sumber daya manusia, termasuk insinyur, pekerja konstruksi, dan tenaga ahli, berperan dalam semua tahap proyek. Dana dari alokasi anggaran pemerintah, dana pusat, dan potensi investasi swasta menjadi sumber daya finansial yang krusial. Sementara itu, penggunaan teknologi dan peralatan konstruksi modern menjadi faktor penentu efisiensi dan kualitas pelaksanaan proyek. Dengan optimalisasi gabungan sumber daya ini, pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara efektif, meningkatkan konektivitas, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Karakteristik organisasi pelaksana

Organisasi pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menonjolkan efisiensi dan partisipasi aktif. Tim teknis, termasuk insinyur, ahli konstruksi, dan personel administratif, bertanggung jawab untuk kelancaran setiap tahap proyek. Keberhasilan proyek didukung oleh peran konsultan pengawas menjaga standar kualitas tinggi. Dengan pendekatan inklusif, melibatkan masyarakat lokal dan kepala desa dalam pemantauan proyek. Sistem pelaporan transparan memberikan tingkat akuntabilitas yang jelas. Dengan karakteristik ini, organisasi pelaksana di Kecamatan Palibelo memainkan peran sentral dalam memastikan pembangunan infrastruktur jalan mencapai standar tinggi dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Sikap para pelaksana

Organisasi pelaksana pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dapat dilihat sebagai entitas yang berfokus pada efisiensi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Terdiri dari tim teknis yang terampil dan terlatih, organisasi ini mencakup insinyur, ahli konstruksi, serta personel administratif yang memastikan kelancaran setiap tahapan proyek. Keberhasilan proyek ini juga ditopang oleh peran konsultan pengawas yang bertugas memastikan standar kualitas yang tinggi. Dengan pendekatan yang inklusif, organisasi ini melibatkan masyarakat lokal dan kepala desa dalam pemantauan proyek, menciptakan keterlibatan langsung dari pihak-pihak yang terkait.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar organisasi terkait dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menonjolkan keberhasilan proyek. Melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten, kontraktor, pemerintah desa, dan masyarakat secara aktif, pertemuan rutin dan forum koordinasi membahas perkembangan proyek serta mengidentifikasi masalah potensial dengan solusi yang kolaboratif. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proyek meningkatkan transparansi, dengan informasi yang terkini disampaikan melalui berbagai saluran, seperti pertemuan umum, papan proyek, dan media sosial. Keseluruhan, komunikasi yang baik menciptakan sinergi di antara pemangku kepentingan, mengarah pada keberhasilan pembangunan jalan dengan melibatkan pemerintah, kontraktor, dan masyarakat secara bersama-sama.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, menampilkan karakteristik lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang beragam. Aspek sosialnya tercermin dalam keberagaman budaya dan solidaritas tinggi, di mana adat istiadat masih memegang peranan penting. Secara ekonomi, mayoritas penduduk mengandalkan sektor pertanian, yang juga memengaruhi struktur ekonomi di wilayah tersebut. Di sisi politik, Palibelo berpartisipasi dalam dinamika politik Kabupaten Bima, melibatkan masyarakat dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan umum, serta terlibat dalam kebijakan pemerintah kabupaten terkait pembangunan infrastruktur jalan. Semua aspek ini memainkan peran krusial dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palibelo secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima berfokus pada pencapaian standar yang tinggi, keberlanjutan, dan keselamatan, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Keberhasilan proyek bergantung pada sumber daya strategis seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologi. Organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya menekankan efisiensi, partisipasi aktif, dan pendekatan inklusif, yang melibatkan masyarakat lokal dan kepala desa. Komunikasi dan koordinasi yang efektif antar organisasi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kontraktor, pemerintah desa, dan masyarakat, berkontribusi terhadap keberhasilan proyek. Keberagaman karakteristik sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Palibelo berperan penting dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

REFERENSI

- Agustino, Leo. (2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
- Basuki, Anton dan Shofwan. (2006) Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance. Malang, SPOD FE UNIBRAW.
- Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 5, Hal. 800-806
- Agostiono. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses 5 September 2010.
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar.
- Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY.
- Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
- Model Kontrol Kualitas Total" oleh Juran dan Gryna, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. Implementation, Theory and Practice, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey
- Herabudin. (2016) Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi, Cet.Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Hesel Nogi S.Tangkilisan, 2003. Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran, Yogyakarta:Y.A.P
- Nugroho, Riant. 2014. Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meter, Van and Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Amsterdam: Van Meter and Van Horn Administration & Society.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta,CV.

- Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.
- Sinambela, LijanPoltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik:Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: PT. BumiAksara.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sirajuddin, I. A. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 1-14.
- Solow, R.1956. Contribution to The Theory of Economic Growth. *Quartely Journal of Economics*70: 65-94.
- Tangkilisan, HeselNogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan (Mutiasari et al, 2016)
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengatur Mengenai Pemerintahan Daerah.